



Tantangan Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi COVID-19 di Indonesia

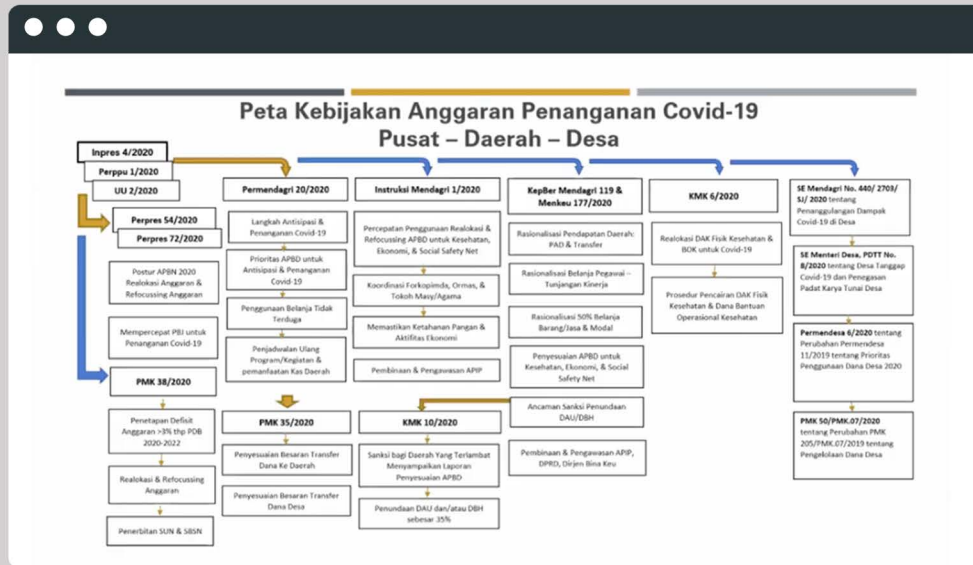
Challenges of Budget Transparency and Synchronization of Fiscal Policy in Tackling COVID-19 in Indonesia

KSIXChange menghadirkan webinar series ke 25 pada 23 Juli 2020 yang berjudul Tantangan Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi COVID-19 di Indonesia. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 di Indonesia menyebar dengan pesat, sehingga menuntut pemerintah untuk tangap dalam menjaga stabilitas perekonomian. Tidak hanya itu, bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat juga diberikan dalam bentuk finansial maupun bantuan langsung non-tunai. Namun kebijakan taktis perlu didampingi dengan transparansi dan akuntabilitas. Penyediaan akses bagi publik terkait realokasi anggaran pada masa pandemi ini semakin penting. Selain itu, kesinambungan implementasi dalam berbagai tingkat juga harus dijamin dengan sinkronisasi kebijakan fiskal dalam merespon COVID-19. Kedepannya, upaya transparansi dan partisipasi publik tidak hanya berjalan pada masa krisis pandemi, tapi juga berkelanjutan.

Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal SEKNAS FITRA, memberikan paparan dengan judul “Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dalam Penanganan COVID-19”. Adapun 3 peristiwa utama yang didasari dari kurangnya informasi selama pandemi yakni: perebutan paksa jenazah COVID-19, politisasi bantuan sosial COVID-19, dan adanya gugatan organisasi-organisasi masyarakat untuk transparansi anggaran COVID-19. Semenjak Indonesia terpapar COVID-19, banyak regulasi yang diturunkan dari pemerintah pusat hingga desa. Beliau menjelaskan mengenai peta kebijakan anggaran penanganan COVID-19 dari pusat ke daerah dan desa yang dapat dilihat pada Gambar 1. Didalam peta tersebut, beliau menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan yang ada telah menghasilkan

KSIXChange held the 25th webinar series on the 23rd of July 2020 titled Budget Transparency and Synchronisation of Fiscal Policies Challenges in Overcoming COVID-19 in Indonesia. As we know, the COVID-19 pandemic in Indonesia spread rapidly, thus demanding the government to be resilient in maintaining economic stability. Additionally, social protection assistance for the community is also provided in the form of financial and non-cash direct assistance. But tactical policies need to be accompanied by transparency and accountability. Providing public access to budget reallocation during this pandemic is increasingly important. Also, the continuity of implementation at various levels must also be guaranteed by synchronising fiscal policy in response to COVID-19. Going forward, efforts to transparency and public participation will not only run during the pandemic crisis, but also sustainable

Misbah Hasan, Secretary General of SEKNAS FITRA, gave a presentation entitled “Budget Transparency and Synchronisation of Fiscal Policies in Handling COVID-19”. The 3 main events based on lack of information during the pandemic are: the forced seizure of the body of COVID-19, the politicisation of social assistance of COVID-19, and the existence of claims by community organisations for transparency of the COVID-19 budget. Since Indonesia has been exposed to COVID-19, many regulations have been passed down from the central government to the villages. He explained the budget policy map for handling COVID-19 from the centre to the regions and villages which can be seen in Figure 1. In the map, he explained how the existing regulations had produced derivatives or had an impact on regulations that continued the policy. For instance, Presidential Instruction No. 4 of 2020 which resulted in Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 of 2020, and then produced Law No. 2 of 2020. The birth of policies at the



Picture 1: Mapping of the Budget Policy for the Handling of COVID-19
Source: Misbah Hasan's Presentation

turunan atau berdampak pada regulasi yang meneruskan kebijakan. Contohnya, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 yang menghasilkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, dan kemudian menghasilkan UU No. 2 Tahun 2020. Lahirnya kebijakan di level pusat menurunkan berbagai kebijakan anggaran di daerah. Perubahan postur APBN di tahun 2020 sesuai dengan UU No. 20 tahun 2019, menunjukkan adanya defisit anggaran terkoreksi semakin dalam dari -Rp 307,2 triliun menjadi -Rp 1.029,2 triliun. Kemudian, Alokasi Belanja Negara untuk Pemerintah Pusat semakin besar mencapai Rp 1.975,2 triliun (72,1%) sedangkan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) fluktuatif sebesar Rp 763,9 triliun (27,9%) terhadap Total Belanja Negara Rp 2.739,1 triliun.

Disampaikannya bahwa total biaya untuk penanganan COVID-19 naik 42% dari Rp 405,1 triliun (Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2020) menjadi Rp 695,2 triliun seperti yang tertulis dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020. Alokasi anggaran meliputi: (1) Kesehatan Rp 87,55 triliun, (2) Perlindungan Sosial Rp 203,90 triliun, (3) Insentif Usaha Rp 120,61 triliun, (4) UMKM Rp 123,46 triliun, (5) Pembiayaan Korporasi Rp 53,57 triliun, dan (6) Sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Rp 106,11 triliun. Menariknya, kenaikan anggaran penanganan COVID-19 ternyata tidak serta merta mampu menurunkan angka masyarakat yang terpapar COVID-19. Tercatat rata-rata jumlah masyarakat yang terpapar mencapai lebih dari 1.000 orang perhari. Beliau juga menyampaikan sebaran anggaran tidak disandingkan dengan kejelasan kewenangan kementerian lembaga, sehingga membingungkan masyarakat.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan dengan detail

central level reduces various budget policies in the regions. Changes to the state budget posture in 2020 in accordance with Law no. 20 of 2019, showed a deeper deficit in the budget deficit from -Rp 307.2 trillion to -Rp 1,029.2 trillion. Then, the allocation of State Expenditures for the Central Government increased to Rp. 1,975.2 trillion (72.1%) while TKDD (Transfer to Regional and Village Funds) fluctuated by Rp. 763.9 trillion (27.9%) to the Total State Expenditure of Rp. 2,739.1 trillion..

He said that the total cost for handling COVID-19 rose 42% from Rp 405.1 trillion (Presidential Regulation No. 1 of 2020) to Rp 695.2 trillion as written in Presidential Regulation No. 72 of 2020. Budget allocation includes: (1) Health Rp. 87.55 trillion, (2) Social Protection Rp. 203.90 trillion, (3) Business Incentives Rp. 120.61 trillion, (4) UMKM Rp. 123.46 trillion, (5) Corporate Financing Rp. 53.57 trillion, and (6) Sectoral Ministry of Institutions and Local Government Rp. 106.11 trillion. Interestingly, the budget increase for handling COVID-19 was not necessarily able to reduce the number of people exposed to the virus, with the average number of people exposed is more than 1,000 per day. He also said that the distribution of the budget was not juxtaposed with the clarity of authority of the ministry of the institution, thus confusing the public.

In his presentation, he explained in detail about issues related to: (1) transparency and accountability and (2) synchronisation of Fiscal policies. Regarding transparency and accountability, the first issue regarding the COVID-19 budget dashboard developed by the Ministry of Finance was inadequate in providing information related to funding sources and expenditure distribution, including budget absorption. Secondly, budget consolidation as mandated in Article 6 of PMK No. 38 of 2020 has not been done. Third, COVID-19 special budget dashboards are not available in the regions. Fourth, access to detailed budget information for



mengenai masalah terkait: (1) transparansi dan akuntabilitas dan (2) sinkronisasi kebijakan Fiskal. Terkait transparansi dan akuntabilitas, masalah pertama mengenai dashboard anggaran COVID-19 yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan belum memadai dalam memberikan informasi terkait sumber pendanaan dan distribusi belanja, termasuk serapan anggaran. Yang kedua, konsolidasi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 PMK No. 38 Tahun 2020 belum dilakukan. Yang ketiga, belum tersedianya dashboard anggaran khusus COVID-19 di daerah. Empat, akses informasi rincian anggaran penanganan COVID-19, baik di pusat maupun daerah, susah didapatkan. Contohnya, Seknas FITRA mencoba mengakses data realokasi APBD untuk penanganan COVID di daerah ke Kementerian Dalam Negeri dari 8 Juli hingga saat ini belum diberikan. Terakhir, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas (DPR/DPRD) dan NGOs karena minimnya informasi.

Terkait masalah sinkronisasi kebijakan fiskal yang dikutip dari Menteri Keuangan, anggaran Kesehatan sebanyak Rp 87,55 triliun baru terserap sekitar 5,12%. Penyerapan yang masih rendah terkait proses perubahan pagu maupun kendala pelaksanaan dilapangan, salah satunya adalah keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kesehatan. Untuk sektor perlindungan sosial, 36,19% sudah terserap dan relatif baik untuk program yang sudah ada. Namun, masih perlu upaya akselerasi untuk program stimulus tambahan seperti Bantuan Langsung Tunai, dana desa, dan kartu pra-kerja. Kemudian, pada sectoral K/L dan pemda baru terserap 5,18% yang secara umum masih dalam proses penyelesaian regulasi. Lain halnya, program dukungan untuk UMKM sudah mulai bergulir dengan 22,74% serapan dana. Tetapi, 0% serapan untuk pembiayaan korporasi yang masih dalam proses

handling COVID-19, both at central and regional levels, is difficult to obtain. For example, the National Secretariat FITRA tried to access the Regional Revenue and Expenditures Budget reallocation data for handling COVID in the regions to the Ministry of Home Affairs from July 8 to the present. Finally, oversight is not carried out by supervisory institutions (DPR / DPRD) and NGOs due to lack of information.

Regarding the synchronisation of fiscal policy, which was quoted by the Minister of Finance, the Health budget of Rp 87.55 trillion was only absorbed by around 5.12%. Absorption is still low related to the process of changes in the ceiling as well as implementation constraints in the field, one of which is the delay in claims for maintenance costs and incentives for health workers. For the social protection sector, 36.19% has been absorbed and is relatively good for existing programs. However, acceleration efforts are still needed for additional stimulus programs such as Direct Cash Assistance, village funds, and pre-employment cards. Then, in the sectoral ministries and the local government only 5.18% is absorbed which is generally still in the process of regulatory completion. Another case, the support program for MSMEs has begun to roll out with 22.74% uptake of funds. However, 0% of uptake for corporate financing is still in the process of administration and the maturation of the support scheme. Then, the utilisation of tax incentives by business actors is still not optimal with 11.18% uptake. The savings that should have been obtained were IDR 139.45 trillion if refocusing the APBD with a scheme of 50% goods / services expenditure of IDR 160.61 trillion and 50% capital expenditure IDR 118.33 trillion with a total of IDR 278.94 trillion. However, almost all regions do not comply with the Joint Provisions issued by the Minister of Home Affairs No. 119 of 2020 and Finance Minister No. 177 of 2020. So that, at this time only 71.85 trillion has been collected from Reallocation of APBD throughout Indonesia.



administrasi dan pematangan skema dukungan. Kemudian, pemanfaatan insentif perpajakan oleh pelaku usaha masih belum optimal dengan 11,18% serapan. Penghematan yang seharusnya dapat diperoleh sebanyak Rp 139,45 triliun jika refocusing APBD dengan skema 50% belanja barang/jasa Rp 160,61 triliun dan 50% belanja modal Rp 118,33 triliun dengan total Rp 278,94 triliun. Tetapi, hampir semua daerah tidak mematuhi Ketentuan Bersama yang dikeluarkan oleh Mendagri No. 119 Tahun 2020 dan Menkeu No. 177 Tahun 2020. Sehingga, saat ini baru terkumpul 71,85 triliun dari Realokasi APBD seluruh Indonesia.

Transparansi dan partisipasi sebagai upaya akuntabilitas sosial lebih konkrit di level desa dengan adanya dashboard terkait anggaran yang diletakkan pada lokasi-lokasi strategis di desa, posko pengaduan, dan partisipasi musyawarah desa. Rekomendasi secara umum dalam penanganan di masa pandemi ini adalah dengan melakukan revitalisasi tata Kelola anggaran penanganan COVID-19 yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas.

Terkait isu-isu yang disampaikan Seknas FITRA, Taufik Hanafi, Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas, menanggapi dengan apresiasi kolaborasi dalam berbagai sektor. Beliau menyampaikan gambaran makro dimana COVID-19 merupakan isu yang unprecedented hingga dibutuhkan regulasi yang unprecedented juga. Bappenas dalam penyusunan perencanaan tahunan melakukan konsultasi publik yang nantinya disampaikan hasil evaluasi secara rutin. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun untuk 2021 yakni "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Reformasi sosial disini juga berarti reformasi dalam sistem-sistem yang ada, dari

Transparency and participation as social accountability efforts are more concrete at the village level with a dashboard related to the budget placed at strategic locations in the village, complaints post, and participation in village deliberations. The general recommendation in handling this pandemic is to revitalise the COVID-19 budget management that is based on transparency and accountability.

Regarding issues raised by the National Secretariat of FITRA, Taufik Hanafi, Deputy for Development Monitoring, Evaluation and Control, Bappenas, responded with appreciation for collaboration in various sectors. As COVID-19 is an unprecedented event, unprecedented regulations are also needed. Bappenas in the preparation of annual plans conduct public consultations which will later be submitted regularly. The theme of the Government Work Plan (RKP) prepared for 2021 is "Economic Recovery and Social Reform". Social reform here also means reform in existing systems, from health, social, and also disaster management. This pandemic opens eyes on the weakness of the health, social, disaster resilience system in Indonesia, and the need for data transparency. Recovery in economic and health aspects cannot be done individually. Bappenas welcomed the findings from CSOs seeing the importance of public participation in handling COVID-19. He also conveyed and invited public participation not only in handling the pandemic, but also in the later planning stages.

Anna Winoto, Team Leader, Community Collaboration and Services for Prosperity (KOMPAK) continued the discussion by conveying KOMPAK's focus on managing public finances. He stated that KOMPAK's target was that the local government could manage the budget effectively ensuring public service quality. However, the challenges are: (1) Diversity of local government capacity. KOMPAK strives to introduce tools to sharpen analysis



kesehatan, sosial, dan juga bencana. Pandemi ini membuka mata terkait lemahnya sistem kesehatan, sosial, ketahanan bencana di Indonesia, dan perlunya transparansi data. Pemulihan dalam aspek ekonomi dan kesehatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Bappenas menyambut baik temuan-temuan dari CSO melihat pentingnya partisipasi publik dalam penanganan COVID-19. Beliau juga menyampaikan dan mengajak partisipasi publik tidak hanya dalam penanganan pandemi, tapi juga dalam tahap perencanaan nantinya.

Anna Winoto, Team Leader, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melanjutkan diskusi dengan menyampaikan fokus KOMPAK terkait dengan pengelolaan keuangan publik. Disampaikan beliau bahwa sasaran KOMPAK adalah pemerintah daerah bisa mengelola anggaran secara efektif hingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Namun, tantangan yang ada: (1) Keragaman kapasitas pemerintah daerah. KOMPAK berupaya untuk memperkenalkan tools untuk mempertajam analisa dan penyusunan anggaran. (2) Pemahaman berbagai instrumen yang diberikan, seperti dana desa, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Umum. (3) Akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan banyaknya instrument dan anggaran yang turun ke daerah, datang juga persyaratan termasuk pertanggungjawaban dan juga pelaporan. Sehingga, cenderungnya akuntabilitas ke pemerintah atas yang dikedepankan, tetapi akuntabilitas kepada masyarakat belum dijalankan.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan

and budgeting. (2) Understanding various instruments given, such as village funds, Regional Incentive Funds, and General Allocation Funds. (3) Accountability to the community. With so many instruments and budgets going down to the regions, come also the requirements including accountability and reporting. Thus, accountability tends to be placed on the government for being put forward, but accountability to the public has not been carried out.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Expert Staff for State Expenditure, Ministry of Finance outlines the increase in the value of fiscal transparency in Indonesia. Indonesia is categorised as a country that is quite transparent. The COVID-19 pandemic is a health crisis which has an impact on other sectors resulting in an economic and social crisis. To avoid the economic crisis, he conveyed the importance of government incentives both for MSMEs, social protection, health budgets, and others. He conveyed that the social protection described by Misbah in his presentation covered almost 60% of the population. He agreed that the importance of the public's role in the handling of the COVID-19 pandemic, including the management of its budget. He explained that the Government had also made several breakthroughs to improve budget realisation, budget monitoring and evaluation, and transparency.

Ubaidi Socheh Hamidi, Head of the State Budget Policy, the Fiscal Policy Office continued the discussion by explaining the budgeting policy process. He said, a budget of Rp. 695 trillion that was poured into handling the pandemic, could not necessarily be immediately issued, thus causing some absorption of the budget not yet running optimally. The government has conducted

menjelaskan secara garis besar mengenai kenaikan nilai transparansi fiskal di Indonesia. Indonesia termasuk kategori negara yang cukup transparan. Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang memberikan dampak pada sektor lain hingga menghasilkan krisis ekonomi dan sosial. Untuk menghindari krisis ekonomi, beliau menyampaikan pentingnya insentif-insentif dari pemerintah baik untuk UMKM, perlindungan sosial, anggaran kesehatan, dan lainnya. Beliau menyampaikan, perlindungan sosial yang dijelaskan Bapak Misbah dalam paparannya, sudah mencakup hampir 60% dari penduduk. Beliau sependapat bahwa pentingnya peran publik dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, termasuk juga pengelolaan anggarannya. Beliau memaparkan bahwa Pemerintah juga telah melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan realisasi anggaran, pemantauan dan evaluasi anggaran, dan transparansi.

Ubaidi Sochek Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal melanjutkan diskusi dengan menjelaskan proses kebijakan penganggaran. Beliau mengatakan, anggaran sebanyak Rp 695 triliun yang digelontorkan untuk penanganan pandemi, tidak serta merta dapat langsung dikeluarkan, sehingga menyebabkan beberapa penyerapan anggaran belum berjalan maksimal. Pemerintah telah melakukan konsultasi dengan aparat penegak hukum, auditor, termasuk konsultasi dengan lembaga legislatif untuk proses pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dengan harapan bahwa proses penyusunan kebijakan dan penganggaran sudah sesuai konsitusi. Dalam konteks anggaran, dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan postur pendapatan negara sangat signifikan. Refocusing dan realokasi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Pada triwulan III dan IV, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Untuk mendorong hal ini, postur anggaran sebagian besar digunakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan pinjaman untuk mendukung perekonomian daerah sekitar Rp 10 triliun dari APBN dan Rp 5 triliun dari dana lain. Beliau menambahkan, ruang yang dapat ditingkatkan lagi yaitu dari sisi pemantauan dan evaluasi pengelolaan anggaran, demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

consultations with law enforcement officials, auditors, including consultations with legislative institutions for a transparent and accountable budget management process in the hope that the process of formulating policies and budgeting is in accordance with the constitution. In the context of the budget, the impact of COVID-19 on the economy and state income posture is very significant. Refocusing and budget reallocation aim to improve efficiency. In the third and fourth quarters, the government targeted positive economic growth. To encourage this, budget postures are mostly used to encourage people's purchasing power. The government also provides additional loans to support the regional economy of around Rp 10 trillion from the state budget and Rp 5 trillion from other funds. He added that the space that could be increased was in terms of monitoring and evaluating budget management, for the realization of transparent and accountable budget management.

